



Ilustrasi: Ingrid D. Wijaya

Testimoni Korban

Operasi Trawl dan Perlawanan Nelayan¹

1. Penelitian ini dilakukan dari 10 Juli sampai 21 Juli 2019 di Dusun 3 Sei Nipah. Saya memilih melakukan penelitian di dusun ini karena jaraknya yang tak terlalu jauh dari rumah saya di Medan. Alasan lain yaitu, *pertama*, nelayan Dusun 3 Sei Nipah masih menggunakan alat tangkap sederhana ketika melaut. *Kedua*, terdapat serikat nelayan yang pengaruhnya cukup kuat di sana. Dan *ketiga*, saya memiliki kontak Pak Sutris, salah satu warga Dusun 3 Sei Nipah yang memungkinkan saya membangun komunikasi awal lalu mengutarakan niat saya untuk melakukan penelitian di dusun ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Dusun 3 Sei Nipah yang telah menerima saya dengan hangat, khususnya kepada Pak Sutris, Pak Irwan beserta keluarga, Bang Denny, dan Bang Bei yang banyak membantu saya memperoleh data untuk penelitian ini. Kepada abang saya, Sutrisno, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani dan membantu saya selama melakukan penelitian ini.

Harits Naufal Arrazie

Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada
arrazieharits@gmail.com

Abstract

How do the traditional fishermen of Dusun 3 Sei Nipah deal with the expansion of trawl operation in their territorial waters? The majority of residents in Dusun 3 Sei Nipah, which is located on the coast of North Sumatera, are fishermen who, to this day, are still using relatively modest and eco-friendly fishing tools. A problem rises to the surface when they put against the 'vicious' trawl that are operating in their waters as well, that will eventually lead to severe ecological, economical, and social impacts on the life of these traditional fishermen. Amidst the unpredictable weather of the sea itself, the presence of trawl makes it multiple times harder for these fishermen to sail and bring home a decent catch. To respond to this circumstance, these traditional fishermen started a resistance to protest against the trawl operation—from directly getting in the way of trawl mobility to form a union of fishermen. This article aims to discuss the impacts of trawl operation and the means of resistance that traditional fishermen of Dusun 3 Sei Nipah are pushing against it.

Keyword: trawl, traditional fishermen, fishermen union, resistance

Abstrak

Bagaimana strategi nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah menghadapi ekspansi *trawl* di wilayah perairan mereka? Dusun 3 Sei Nipah terletak di pesisir dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap yang relatif sederhana dan tidak merusak lingkungan. Masalah kemudian muncul ketika mereka dihadapkan dengan ganasnya *trawl* yang beroperasi di wilayah tangkap mereka. Selain merusak ekosistem laut, kehadiran *trawl* juga memiliki dampak ekonomi dan sosial bagi nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah. Di tengah kondisi laut yang tak dapat diprediksi, kehadiran *trawl* kian membuat nelayan tradisional terpuruk. Merespons kenyataan ini, nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah melakukan perlawanan untuk menolak kehadiran *trawl*. Perlawanan dilakukan dengan cara menghalangi langsung mobilitas *trawl* hingga membentuk serikat nelayan. Tulisan ini hendak mendiskusikan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari hadirnya *trawl* serta upaya perlawanan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah dalam menghadapinya.

Kata kunci: *trawl*, nelayan tradisional, serikat nelayan, perlawanan

Prolog

Siang itu, kira-kira pukul 11, saat air di muara sungai mulai surut, nelayan-nelayan Dusun 3 Sei Nipah telah kembali dari laut.¹ Mereka turun dari sampan sambil menggotong ember berisi hasil tangkapan yang diperoleh selama melaut sejak subuh. Mereka mulai mendaratkan ikan di tempat pelelangan dan berharap menuai rupiah dalam jumlah memadai dari melaut hari itu. Sejumlah rupiah yang kemudian ditukar lagi dengan berbagai bahan-bahan keperluan hidup untuk beberapa hari ke depan. Setelah uang yang diperoleh dari menjual ikan hasil tangkapan habis, mereka kembali pergi melaut lalu menjual lagi ikan hasil tangkapannya. Siklus kegiatan ini rutin berlangsung dari hari ke hari, waktu ke waktu, tanpa lonjakan perubahan hidup yang mengejutkan, kecuali terjadi peristiwa berbeda yang tidak diharapkan.

Di bawah teriknya sinar matahari siang itu, salah satu nelayan yang baru saja pulang melaut mengajak saya yang lagi nongkrong di tempat pelelangan ikan melihat alat tangkapnya yang rusak. Namanya Denny, nelayan yang hari-harinya memburu sotong di laut. Ketika tiba di lokasi, Denny mulai menurunkan *rawe*² dari sampannya. Kondisinya tak beraturan. *Kajar*³ yang menghubungkan setiap rumah siput saling silang tak karuan. Bentuknya sebelas-duabelas dengan benang kusut. “Disikat katrol (*trawl*),” katanya.

Denny lalu mengeluarkan *cutter* dan mulai memperbaiki alat tangkapnya. Setiap *kajar* yang kusut dipotong lalu

disambungkan kembali. Kondisi *rawe* setelah diperbaiki jelas sangat berbeda dengan kondisinya semula. Panjang *kajar* yang menghubungkan rumah siput yang semula sepanjang dua *depa*, kini tak beraturan. Ada yang terlampau panjang, ada yang terlalu pendek. Tepat di sebelah Denny, terdapat pula tumpukan *rawe* milik nelayan lain yang kondisinya cukup mirip dengan milik Denny; bertumpuk, diselimuti karang, dan kusut. Saya menduga-duga saja kalau *rawe* itu agaknya mengalami nasib serupa: disikat katrol. Dan rupanya memang benar.

Pak Bobi⁴ datang menghampiri Denny yang tengah sibuk mengurai, memotong, dan menyambung *kajar*. Ternyata, tumpukan *rawe* di sebelah Denny itu adalah miliknya. Cerita Pak Bobi lebih mencengangkan lagi. Dari total 1500-an rumah siput yang dia labuhkan saat melaut, hanya sekitar lima puluh yang berhasil ditemukan kembali. Itu pun ditemukan secara tak sengaja dan kondisinya juga kusut tak beraturan. Lebih lagi, cuaca yang ekstrem dan serba tak pasti selama seminggu terakhir membuat Pak Bobi tak mendapatkan hasil maksimal ketika melaut. Maka, dalam kondisi ini, merangkai ulang alat tangkap jadi opsi satu-satunya bagi nelayan di Dusun 3 Sei Nipah, sebab biaya yang diperlukan untuk membeli alat tangkap baru cukup menguras kantong. Sambil bergurau, Denny berujar kalau *cutter*-nya yang sudah berkarat saja sampai sekarang tak terganti, apalagi untuk membeli alat tangkap baru.

1. Dusun ini merupakan satu dari tiga dusun yang ada di desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penduduk Dusun 3 Sei Nipah secara umum beretnis Banjar.

2. *Rawe* adalah sebutan untuk alat tangkap.

3. *Kajar* adalah tali yang menyambungkan tiap-tiap rumah siput.

4. Bukan nama sebenarnya.



Kondisi rawe setelah disikat trawl. (Dokumen Pribadi)

Denny dan Pak Bobi adalah salah dua penduduk Dusun 3 Sei Nipah yang berprofesi sebagai nelayan. Lebih tepatnya, nelayan tradisional. Mereka dapat dikatakan sebagai nelayan tradisional karena seluruh nelayan di Dusun 3 Sei Nipah masih melaut dengan menggunakan alat tangkap sederhana yang sudah mereka pakai secara turun-temurun. Alat tangkap yang bahan-bahannya dapat dibeli dengan mudah di pasar terdekat, lalu dirangkai sendiri, atau bahkan dibeli dalam kondisi siap pakai. Beberapa nelayan di sana juga ada yang menjual alat tangkap sederhana ini. Kata Denny, alat tangkap ini tidak akan merusak terumbu karang yang ada di wilayah tangkapan mereka. Jadi, penggunaan istilah tradisional lebih ditujukan untuk penegasan terhadap sifat dari alat tangkap itu sendiri.

Seperti kondisi nelayan pada umumnya, nelayan Dusun 3 Sei Nipah juga terus mengembangkan alat tangkap sesuai dengan kebutuhan. Jenis dan panjang jaring yang digunakan akan selalu disesuaikan dengan pengetahuan nelayan tentang kondisi ikan di laut, serta terkait pula dengan godaan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak mengikuti tuntutan hidup yang terus berubah. Apabila disandingkan dengan *trawl*, keefektifan alat tangkap nelayan tradisional jelas kalah telak. Sekali melabuh, nelayan tradisional paling-paling hanya dapat membawa hasil tangkapan sekitar puluhan kilogram, ditambah terbatasnya daya jelajah dan cuaca laut yang tak menentu. Apabila menggunakan *trawl*, nelayan mampu mencapai hitungan ton per sekali layar,

dengan wilayah tangkap yang luas serta seolah tak hirau dengan kondisi cuaca di laut.

Kehidupan nelayan tak pernah jauh dari ketidakpastian,⁵ begitu juga dengan nelayan Dusun 3 Sei Nipah. Di tengah kondisi cuaca dan hasil tangkap yang serba tak pasti itu, nelayan Dusun 3 Sei Nipah harus menghadapi kenyataan bersaing dengan ganasnya *trawl* di laut. Persaingan memperebutkan hasil laut dengan *trawl* menimbulkan bermacam dampak bagi nelayan tradisional, baik dampak ekonomi, lingkungan, hingga sosial, yang memengaruhi kualitas hidup nelayan tradisional dari waktu ke waktu. Menyikapi keadaan ini, nelayan tradisional tentu menolak untuk pasrah begitu saja. Mereka melakukan berbagai perlawanan, mulai dari yang sporadis hingga hingga yang terorganisir. Salah satu bentuk perlawanan sporadis yang diupayakan para nelayan di Dusun 3 Sei Nipah adalah menghalangi langsung mobilitas nelayan *trawl* yang sedang beroperasi.

Namun, nelayan tradisional sendiri pun menyadari bahwa melawan secara sporadis tidak akan memberikan dampak signifikan. Karena itu, mereka membentuk serikat nelayan untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam melakukan perlawanan. Dengan berserikat, nelayan memiliki daya tawar lebih untuk menuntut apa yang tidak sesuai dan perlawanan yang digulirkan memiliki tujuan yang jelas. Serikat menjadi wadah bagi nelayan untuk mengumpulkan kekuatan dan bersama-

sama menolak hadirnya *trawl*. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode pengamatan partisipatif (*participant observation*) dan mewawancarai nelayan tradisional di Dusun 3 Sei Nipah selama lebih kurang dua minggu. Berdasarkan itu, tulisan ini hendak mendiskusikan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari hadirnya *trawl* serta bagaimana resistensi nelayan tradisional dalam menghadapinya.

Kisah Awal Harimau Laut (*Trawl*)

Susi Pudjiastuti membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁶ Peraturan itu muncul sebagai upaya mendorong penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Selama ini, jenis alat tangkap ikan seperti pukat hela dan pukat tarik diketahui tidak ramah lingkungan.⁷ Sebab, sekali jaring disebar ke dalam laut, alat tangkap ini menyapu segala jenis biota laut yang terjebak di dalamnya. Banyak dari hasil tangkapan itu yang dibuang kembali karena berukuran terlalu kecil dan tidak ekonomis. Hasil tangkapan yang dibuang kembali ke laut akan membusuk dan kemudian menjadi limbah yang mencemari laut. Selain itu, pukat hela dan pukat tarik—kalangan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah menyebutnya “katrol”—mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang

5. Lihat James M. Acheson, “Anthropology of Fishing,” *Annual Review Anthropology* 10.1 (1981).

6. Frendy Kurniawan, “Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia - Tirto.id”, Tirto.Id, Last modified 2019, <https://tirto.id/polemik-cantrang-dan-angka-perikanan-tangkap-indonesia-cDI6>.

7. Lihat Novita Eka Syaputri, “Pukat Dapat Merusak Ekosistem dan Sebabkan Degradasi Sumber Daya Perikanan”, Wwf.Or.Id, Last modified 2019, <https://www.wwf.or.id/?37422/Pukat-Dapat-Merusak-Ekosistem-dan-Sebabkan-Degradasi-Sumber-Daya-Perikanan>.

berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan. Akibatnya, praktik-praktik ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Peraturan yang dicetuskan Susi Pudjiastuti ini bukanlah aturan baru di Indonesia. Saat Orde Baru, tepatnya pada tahun 1980, sebuah aturan dikeluarkan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawls* itu dinyatakan berlaku di perairan Jawa, Sumatera, dan Bali.⁸ Aturan itu muncul karena penggunaan *trawl* begitu marak dan memunculkan bermacam persoalan. Namun, menurut Bailey, turunya keputusan pelarangan *trawl* itu berkaitan dengan kepentingan pemerintah Orde Baru untuk menggaet simpati nelayan kecil yang merupakan mayoritas anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).⁹ Organisasi ini dibentuk oleh golongan elit saat itu dan menjadi salah satu unsur Sekretariat Bersama Golongan Karya.¹⁰ Dengan kata lain, HNSI dibentuk untuk kepentingan politik guna memenangkan kelompok elite yang saat itu hendak meraih kekuasaan.

Bailey menyebutkan bahwa *trawl* diketahui pertama kali muncul di Asia Tenggara sekitar tahun 1940-an.¹¹ Untuk Indonesia sendiri, *trawl* sudah mulai digunakan sejak dekade 60-an.

Penggunaan *trawl* ini didorong oleh modernisasi usaha penangkapan ikan secara besar-besaran di bawah kekuasaan Orde Baru.¹² Yuwono menjelaskan, dalam jumlah yang besar, modal luar negeri dan dari para pengusaha diinvestasikan ke dalam sektor perikanan dalam bentuk infrastruktur dan armada penangkapan ikan modern.¹³ Sekitar pertengahan dekade 1960-an, teknologi alat tangkap ikan itu lantas diadopsi oleh nelayan-nelayan Malaysia di sekitar perairan Selat Malaka.¹⁴ Karena wilayah itu dekat secara geografis dengan Indonesia, *trawl* lantas dicangkok oleh nelayan Indonesia, terutama yang berada di sekitar pulau Sumatera.¹⁵ Karena didorong oleh permintaan pasar luar negeri yang kuat, *trawl* mulai diterima secara luas di kalangan nelayan Indonesia pada akhir tahun 1960-an.¹⁶

Kemudian, pada 1970, perahu *trawl* mulai dikembangkan di Indonesia, tepatnya di Bagan Siapi-api, Sumatera Utara, sebagai upaya untuk mendongkrak produksi perikanan tangkap.¹⁷ Dalam pemakaiannya, *trawl* jelas sangat efektif sebagai alat tangkap karena mampu menangkap semua jenis sasaran tangkap, terutama di perairan dasar laut. Saking efektifnya *trawl*, perairan Bagan Siapi-api dan Selat Malaka mengalami kelebihan tangkap (*overfishing*) saat itu. Ikan dan

8. Frendi Kurniawan, "Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia"

9. Conner Bailey, "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia," *Indonesia* 46 (1988).

10. Conner Bailey, "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia,"

11. Conner Bailey, "Conflict in the Commons: The Case of Indonesian Fisheries," *Annual meeting of Association of Asian studies, Chicago* (Maret 1986).

12. Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s* (Yogyakarta: Benang Merah, 2003), xviii.

13. Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Close to the Stone, Far from the Throne*, xviii.

14. Frendi Kurniawan, "Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia"

15. Frendi Kurniawan, "Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia"

16. Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Close to the Stone, Far from the Throne*, 130.

17. Lihat Majalah Tempo edisi 29 Oktober, 5 November, dan 12 November yang dikutip dalam Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung* (Jakarta: KONPHALINDO, 1998), 6.

udang di kawasan itu habis. Untuk menyelamatkan usaha, perahu-perahu *trawl* memindahkan wilayah kerja mereka ke perairan laut Jawa dan laut selatan di sekitar Cilacap.¹⁸

Dengan kepindahan itu, banyak ditemukan pengusaha perikanan sukses di Jawa yang berasal dari Bagan Siapi-api yang dulunya adalah nelayan *trawl*.¹⁹ Kesuksesan pengusaha perikanan yang menggunakan *trawl* didukung pula dengan belum adanya kebijakan zonasi yang mengatur wilayah tangkap berdasarkan kemampuan alat tangkap saat itu.²⁰ Kenyataan ini menimbulkan persaingan tak berimbang antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional. Di satu sisi, nelayan *trawl* kian berjaya menyapu berbagai jenis ikan di laut. Namun, di sisi lain, nelayan tradisional tersingkir ke wilayah tangkap yang tak lagi banyak ikannya. Tak pelak, konflik horizontal antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* pun terjadi di berbagai perairan laut Indonesia. Persaingan wilayah tangkap kian tidak berimbang karena kehadiran *trawl* di Jawa dikawal ketat oleh aparat sehingga muskil bagi nelayan tradisional setempat untuk melakukan perlawanan.²¹ Jadi, di masa lalu, aparat justru bergandeng tangan dengan para pemilik *trawl* yang berasal dari Bagan Siapi-api untuk mengukuhkan eksistensi mereka di perairan pesisir Jawa.²²

Keberpihakan aparat ini memunculkan spekulasi bahwa ada pembagian keuntungan antara pengusaha dengan aparat dalam

pengoperasian *trawl*, meski pada saat yang sama muncul pula upaya-upaya meredam spekulasi itu dengan cara mengakomodasi nelayan tradisional dalam pengoperasian *trawl*. Upaya akomodasi yang tidak menyentuh akar permasalahan ini tampak seperti yang terjadi di Pekalongan pada tahun 1972 dengan memberi kesempatan pada nelayan lokal menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal *trawl*.²³ Tetapi, hal semacam itu tak terjadi di daerah lain, sehingga memantik konflik di banyak tempat dan berujung pada keluarnya Keppres No.39/1980 yang melarang pengoperasian *trawl*. Dengan kata lain, awal mula dikeluarkannya larangan pengoperasian *trawl* bukanlah persoalan menjaga kelestarian ekosistem laut, melainkan untuk meredam konflik yang terjadi di kalangan nelayan.

Kerakusan dan Keganasan *Trawl*

Masing-masing nelayan tradisional cenderung menciptakan alat tangkap ikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sebagai masyarakat dengan karakter budaya melaut untuk skala personal atau keluarga, nelayan hanya membutuhkan alat tangkap berupa tombak, pancing, bubu, atau tangguk dengan mobilitas rendah dan wilayah buruan terbatas di sekitar pemukiman. Dalam konteks budaya komersial skala kecil, nelayan membutuhkan alat tangkap berupa jaring dengan dukungan sarana perahu dayung yang memungkinkannya menjelajahi wilayah tangkap yang

18. Lihat Majalah Tempo edisi 29 Oktober, 5 November, dan 12 November yang dikutip dalam Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*, 6.

19. Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 228.

20. Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, 229.

21. Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, 229.

22. Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, 229.

23. Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, 229.

lebih jauh dari pemukiman. Pada level industrial, nelayan berupaya mencukupi kebutuhan industri yang bergerak di bidang perikanan dengan cara budidaya, menggunakan jaring ukuran besar untuk menangkap ikan, dan menggunakan perahu bermotor yang memungkinkannya menjelajahi wilayah tangkap yang sangat luas.

Kebutuhan untuk mendapatkan hasil tangkap yang meningkat dari waktu ke waktu ini mendorong manusia menciptakan teknologi yang semakin efektif dan efisien. Dalam konteks kegiatan perikanan laut, *trawl* diciptakan untuk memenuhi kebutuhan industri komersial. Tanpa disadari, kebutuhan manusia yang terbatas telah bergeser menjadi keinginan tanpa batas. Keinginan tanpa batas ini, mengikuti Polanyi, disebabkan oleh ekspansi pasar secara eksekutif yang mengakibatkan terserapnya entitas-entitas nonpasar sepenuhnya ke dalam mekanisme pasar, seperti nilai kerja (otentisitas aktivitas manusia), tanah (alam) dan uang (alat pertukaran dalam pasar) menjadi komoditi.²⁴

Dalam kondisi masyarakat pasar (*market society*) seperti ini, Polanyi lebih lanjut menjelaskan bahwa problem akan muncul karena masyarakat diletakkan di bawah kekuasaan mekanisme pasar.²⁵ Ditambah lagi, kapitalisme juga mensyaratkan persaingan dan maksimalisasi keuntungan sebagai dasar aturan kehidupan.²⁶ Dengan satu atau lain cara, Wood mengatakan

bahwa kapitalisme secara alami muncul ketika pasar mengalami perluasan dan perkembangan teknologi telah mencapai tahap yang tepat.²⁷ Pada tahap itu, nelayan yang menggunakan *trawl* menjadi semakin berorientasi komersial dan mengakumulasi profit. Dengan menggunakan *trawl*, nelayan mampu memperoleh hasil tangkap yang amat melimpah. Apa pun yang berada di jalur *trawl* akan disapu habis. Bahkan, nelayan akan mendapatkan hasil tangkap sampingan (HTS) yang sebenarnya merupakan bagian dari tangkapan yang tidak dikehendaki atau bukan merupakan sasaran utama.²⁸

Peraturan Menteri Kelautan No.2/Permen-KP/2015 tak hanya melarang penggunaan *trawl*, tetapi juga pukat tarik. Dalam aturan itu, cantrang berada di bawah klasifikasi pukat tarik yang dilarang. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut melarang cantrang karena banyak nelayan yang melakukan modifikasi. Karena dimodifikasi, cantrang jadi tak ada bedanya dengan jenis *trawl* yang secara umum disorot mengancam kelestarian lingkungan. Akal-akalan nelayan *trawl* dalam memodifikasi alat tangkap juga dikeluhkan oleh Bei, salah satu nelayan tradisional di Dusun 3 Sei Nipah.

“Mau cantrang, arad, atau apa pun itu, semuanya sama saja. Namanya saja yang berubah. Penggunaannya tetap sama seperti katrol (*trawl*). Dikasih pemberat supaya tenggelam, lalu ditarik.”²⁹

24. Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001), 71—75.

25. Karl Polanyi, *The Great Transformation*, 74—75.

26. Ellen Meiksins Wood, *The Origin of Capitalism: A Longer View* (London: Verso, 2002), 1—8.

27. Ellen Meiksins Wood, *The Origin of Capitalism*, 5.

28. Lihat Steve Eayrs, *A Guide to Bycatch Reduction in Tropical Shrimp-Trawl Fisheries* (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007), 1

29. Wawancara dengan Bei, 11 Juli 2019.

Setelah empat tahun aturan pelarangan *trawl* diterbitkan, alat tangkap yang dengan rakus melahap berbagai jenis dan ukuran biota laut serta dengan ganas merusak lingkungan perairan itu masih berkeliaran sampai saat ini. Berbeda dengan daerah lain, Pak Irwan³⁰ menuturkan bahwa seluruh nelayan yang ada di Dusun 3 Sei Nipah tak ada yang menggunakan *trawl*. Bahkan ia berani mengklaim bahwa seluruh nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada yang menggunakan *trawl*. Nelayan Dusun 3 Sei Nipah sendiri menyinyalir bahwa *trawl* yang beroperasi di wilayah tangkap mereka berasal dari kabupaten lain, misalnya Kabupaten Batubara. Karena bahan³¹ yang terkandung di wilayah tangkap nelayan *trawl* sudah habis, mereka lantas berpindah mencari wilayah tangkap baru.

Sebenarnya, apabila nelayan pendatang tidak menggunakan alat tangkap yang lebih canggih meski memiliki daya tangkap yang lebih hebat dari nelayan setempat, persoalan tidak akan muncul. Persoalan muncul ketika nelayan pendatang ternyata menggunakan teknologi penangkapan yang jauh lebih maju dan efektif dibandingkan dengan nelayan setempat. Akibatnya, nelayan setempat “kalah bersaing” dan mengalami kesulitan untuk mendapat hasil tangkapan yang memadai.³² Kalah bersaing dan kenyataan sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan ini merupakan benih-benih munculnya konflik horizontal kelak. Jika situasi

ini tak diantisipasi, operasi *trawl* hanya akan menghasilkan korban bagaikan pepatah “tikus mati di lumbung padi”. Nelayan tradisional justru menderita di kelimpahan potensi laut negaranya.

Laut sebagai Wilayah Bebas

Meskipun *trawl* adalah produk dari modernisasi alat tangkap, Emmerson berpendapat bahwa sengketa di kalangan nelayan dewasa ini pada dasarnya bukanlah resistensi terhadap modernisasi.³³ Nelayan tradisional yang saat ini menggunakan sampan bermotor adalah salah satu buktinya. Sengketa di kalangan nelayan, walau biasanya terjadi bersamaan dengan kehadiran alat tangkap baru yang lebih efektif, bukanlah perlawanan terhadap perubahan teknologi, tetapi karena terganggunya nilai-nilai atau norma-norma tentang keadilan,³⁴ khususnya keadilan yang tidak hadir pada kenyataan hidup nelayan tradisional. Maksudnya, pembiaran negara terhadap operasi *trawl* menyebabkan kerugian berlapis di kalangan nelayan tradisional. Hadirnya teknologi *trawl* harus diakui telah membuat sebagian nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah, namun sekelompok nelayan lainnya mengalami penurunan hasil tangkapan yang drastis.

Karena sifatnya yang ekspansif dan destruktif, nelayan *trawl* akan terus selalu mencari wilayah tangkapan baru. Perluasan wilayah tangkap dimungkinkan karena laut adalah

30. Pak Irwan adalah ketua SNSU kabupaten Serdang Bedagai.

31. Nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah menyebutkan kandungan (ikan) yang ada di laut dengan sebutan bahan.

32. Pujo Semedi Hargo Yuwono. “Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan,” *Populasi* 13.1 (2002)

33. Donald K. Emmerson, “Orders of Meaning: Understanding Political Change in A Fishing Community in Indonesia,” dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin (ed.), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate* (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1982).

34. Pujo Semedi Hargo Yuwono. “Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan.”

wilayah yang tak bisa dipatok dan dipagar untuk menunjukkan batas simbolik dan fisik kepemilikan.³⁵ Ikan di laut adalah benda milik umum (*common property*)³⁶ yang boleh diambil oleh siapa pun yang mau mengambilnya. Menurut Yuwono, secara kultural masyarakat melihat laut sebagai wilayah *frontier* yang terbuka bagi siapa saja.³⁷ Artinya, laut dalam suatu negara secara alami menyediakan kebutuhan hidup dalam skala yang luar biasa besar, namun secara personal atau kelompok memang tak pernah diklaim sebagai milik siapa saja. Secara turun temurun pula, masyarakat nelayan memiliki aturan main tersendiri tentang bagaimana wilayah penangkapan ikan dimanfaatkan. Dalam konteks kehadiran *trawl* bagi nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah, saya menemukan bahwa aturan main yang terganggu bukan hanya norma-norma keadilan seperti apa yang diutarakan Emerson, tetapi gangguan terhadap kesadaran atas keberlangsungan ekosistem laut sebagai tempat nelayan menggantungkan hidup setiap harinya.

Nelayan Dusun 3 Sei Nipah bercerita bahwa *trawl* awalnya beroperasi di tengah laut, cukup berjauhan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional. Seiring menurun hingga habisnya hasil tangkapan di tengah laut, secara perlahan nelayan *trawl* mulai bergerak ke tepi dan menyambangi wilayah tangkap nelayan tradisional. Akibatnya dapat ditebak, kondisi wilayah tangkap nelayan tradisional mengalami kerusakan. Tak hanya itu saja, alat tangkap nelayan tradisional yang

ditinggal di laut akan bernasib serupa seperti milik Denny dan Pak Bobi.

Mencari wilayah tangkap baru bukanlah fenomena asing di kalangan nelayan, baik itu nelayan tradisional ataupun nelayan *trawl*. Sebagai masyarakat berburu dan meramu, nelayan hanya mampu memaksimalkan upaya penangkapan. Ketika upaya penangkapan ditingkatkan, harapannya, semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Memperluas atau mencari wilayah tangkap baru adalah bentuk dari memaksimalkan upaya penangkapan itu. Dengan kata lain, mencari wilayah tangkap baru adalah ciri khas nelayan. Sebab laut, dalam bahasa Acheson, merupakan *alien environment* yang tak pernah benar-benar dapat dipahami.³⁸ Nelayan tak kuasa menentukan berapa besar jumlah ikan yang akan mereka dapat.³⁹ Dengan sarana yang dimilikinya, nelayan tak mampu mendeteksi secara tepat di mana wilayah tangkap yang dapat menghasilkan tangkapan dalam jumlah tertentu. Sejauh itu, nelayan hanya mengandalkan kelaziman intuitif yang tentu tidak memadai untuk melawan kecanggihan teknologi yang digunakan nelayan *trawl* dalam meraup sebanyak-banyaknya hasil tangkapan dari laut.

Bergesernya *trawl* ke wilayah tangkap nelayan tradisional, karenanya, patut dipertanyakan lebih jauh. Dengan kemampuan *trawl* yang mampu menangkap apa saja, sudah selayaknya nelayan *trawl* beroperasi di wilayah tangkap yang sama sekali

35. Pujo Semedi Hargo Yuwono. "Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan."

36. Lihat James M. Acheson, "Anthropology of Fishing,"

37. Pujo Semedi Hargo Yuwono. "Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan."

38. James M. Acheson, "Anthropology of Fishing,"

39. Pujo Semedi Hargo Yuwono, *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*, 12.

tidak dijangkau oleh nelayan tradisional. Mengoperasikan *trawl* di wilayah tangkap nelayan tradisional sama saja dengan menindas nelayan tradisional, sebab terdapat perbedaan penggunaan teknologi—yang didukung oleh aset dan moda produksi yang lebih banyak dan canggih—yang sangat kontras. Pada wilayah yang sama, nelayan tradisional menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara nelayan *trawl* untuk memenuhi kebutuhan perniagaan dan industri yang menguntungkan secara komersial. Pada situasi seperti ini, tentu tak terelakkan ada pihak yang dirugikan bahkan menderita. Kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan karena harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dalam upaya mengakses sumberdaya laut pada wilayah bebas.

Sebagai ilustrasi, suatu waktu Pak Irwan⁴⁰ terpaksa meninggalkan jaringnya di tengah laut karena cuaca buruk. Ia memutuskan pulang ke rumah dan mengambil jaringnya esok hari. Ketika tiba di lokasi keesokan harinya, ia menemukan jaringnya sudah dalam kondisi rusak. Dan di dekat sana, terdapat perahu *trawl* yang tengah bersandar. Pak Irwan mendatangi perahu itu dan mengajukan protes mengapa mereka mengoperasikan *trawl* di wilayah tangkap nelayan tradisional. Jawaban yang didapatkan Pak Irwan sungguh membingungkan. “Kami ketiduran dan ketika bangun tahu-tahu sudah berada di sini,” ucap Pak Irwan menirukan jawaban yang ia dapat dari nelayan *trawl*. Mengapa membingungkan? Nelayan *trawl* tak perlu membuang sauh dan menunggu di

perahu mereka agar ikan masuk ke alat tangkap, sebab *trawl* dioperasikan dengan cara ditarik. Kasus ini menunjukkan bahwa sekalipun alat tangkap yang digunakan tergolong canggih, metode pendeteksian pergerakan ikan di dalam laut masih tetap menggunakan cara-cara yang bersandar pada pengalaman dan pengetahuan kelautan tradisional.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila mengatakan bahwa penggunaan dan penguasaan teknologi yang diciptakan untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan malah melakukan tendangan balik dan menyebabkan ketidakadilan bagi kualitas kehidupan nelayan, yakni perbedaan hasil tangkapan yang amat kontras dan kerugian di kalangan nelayan tradisional. Nelayan tradisional kian terpuruk setelah *trawl* mulai bergeser ke wilayah tangkap mereka. Secara ekonomi, nelayan tradisional mengalami kerugian ganda. *Pertama*, berkurangnya hasil tangkapan. Dan *kedua*, rusaknya alat tangkap. Ungkapan Denny barangkali dapat memberikan gambaran gamblang terkait keterpurukan itu.

“Secanggih apa pun alat tangkap yang digunakan, kalau yang ditangkap habis, bagaimana? Menjeritlah kami nelayan kecil (*tradisional*) ini.”⁴¹

Dampak Lain yang Mengerikan

Dampak merugikan karena operasi *trawl* tidak berhenti pada rusaknya alat tangkap dan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional. Satu kisah mengenai *trawl* yang masih hangat di kalangan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah adalah kasus Pak Iyan.⁴² Ketika

40. Wawancara dengan Pak Irwan, 19 Juli 2019.

41. Wawancara dengan Denny, 11 Juli 2019.

42. Wawancara dengan Pak Iyan, 20 Juli 2019.

melaut, Pak Iyan menangkap basah perahu *trawl* yang tengah beroperasi. Ia segera mendarangi nelayan *trawl* itu. Tanpa disangka, ketika perahu mereka berdekatan, nelayan *trawl* menabrakkan kapalnya ke kapal Pak Iyan. Kontan, kapal Pak Iyan yang ukurannya jauh lebih kecil hancur. Nelayan tradisional yang berada di sekitar Pak Iyan segera datang untuk menolongnya. Para nelayan ini segera mengepung kapal nelayan *trawl* dan berniat membalas perlakuan tak patut yang mereka lakukan terhadap Pak Iyan. Merasa terpojok, nelayan *trawl* melemparkan barang-barang yang ada di kapal mereka ke nelayan tradisional yang mengepungnya. Pak Iyan kemudian berhasil selamat dengan naik ke atas perahu nelayan lain. Di tengah laut itu, perahu Pak Iyan karam dan nelayan *trawl* melarikan diri.

Kasus ini lalu dibawa ke pengadilan oleh Pak Iyan. Mereka menjemput perahu Pak Iyan yang sudah rusak itu lalu membawanya ke Satuan Polisi Air. Kasus ini diadvokasi oleh Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU) dan sempat sampai di meja sidang. Namun, seperti kasus rakyat kecil yang jamak terjadi, hukum yang tidak berpihak pada nelayan tradisional membuat kasus ini menguap begitu saja. Nelayan yang diduga mengoperasikan kapal *trawl* itu tak hadir saat sidang kedua. Setelah peristiwa ini, Pak Iyan tak dapat melaut selama dua bulan dan mengalami trauma. Sampan yang dianalogikan nelayan sebagai periuk tak dapat digunakan untuk mencari makan. Periuk Pak Iyan tak hanya bocor dan tak dapat ditambal, tetapi terbelah hancur dan tak bisa lagi digunakan.⁴³

Ruwetnya proses hukum yang mesti

dilalui nelayan ketika bersitegang dengan *trawl* membuat mereka menempuh cara lain, yaitu aksi kolektif, termasuk dengan menggunakan kekerasan. Nelayan-nelayan Dusun Sei 3 Nipah bercerita bahwa sudah tak terhitung lagi berapa kali di masa lalu mereka pernah melakukan pembakaran terhadap kapal *trawl*. Namun, lagi-lagi, melakukan pembakaran juga berimplikasi buat kalangan internal nelayan tradisional. Seperti kasus Pak Iyan, nelayan *trawl* takkan ragu-ragu melawan balik apabila bergesekkan secara langsung dengan nelayan tradisional di laut. Tak tanggung-tanggung, nyawa nelayan tradisional yang jadi taruhan.

Hal ini kontan membuat nelayan tradisional ketakutan pergi melaut. Konflik-konflik kecil yang bersumber dari desakan agar tak 'main hakim sendiri' pun beredar di antara nelayan tradisional. Imbauan—atau lebih tepatnya peringatan—ini cukup ampuh meredam kemarahan para nelayan tradisional, sebab mereka khawatir akan mengalami nasib serupa apabila secara kebetulan bertemu dengan nelayan *trawl* ketika melaut. Akhirnya, para nelayan tradisional berpikir ulang bahwa melawan dengan cara-cara kekerasan semacam itu tidaklah efektif dan malah dapat menjadi bumerang. Para nelayan mulai memperhitungkan kemungkinan mendapat hukuman badan yang harus mereka terima aparat ikut campur dalam masalah ini. Karena itu, nelayan tradisional lebih memilih 'main aman' apabila bertemu nelayan *trawl* di laut, sehingga melakukan perlawanan secara terorganisir—melalui jalur serikat—adalah pilihan yang paling masuk akal. Kekhawatiran pergi melaut

43. Wawancara dengan Pak Iyan, 20 Juli 2019.

nyatanya tak hanya dirasakan nelayan tradisional saja. Nelayan *trawl* sendiri tentu menyadari adanya risiko yang tak dikehendaki apabila mereka bertemu dengan nelayan tradisional di laut. Berdasarkan penuturan nelayan Dusun 3 Sei Nipah, saat ini nelayan *trawl* umumnya beroperasi dalam jumlah besar. Tak tanggung-tanggung, jumlah nelayan *trawl* dalam sekali operasi dapat mencapai puluhan kapal. Kalau kata Denny, “Gelap laut itu kalau mereka (nelayan *trawl*) melaut.” Para nelayan *trawl* tentu khawatir ketika melaut sendirian, sebab mereka akan bertemu nelayan tradisional yang jumlahnya juga tak kalah banyak. Melaut secara gerombolan ini penting untuk mengantisipasi meletusnya konflik langsung dengan nelayan tradisional.

Trawl sebagai alat tangkap yang sangat mangkus serta menjanjikan hasil tangkap yang melimpah tentu menggoda setiap nelayan untuk menggunakannya. Tak terkecuali nelayan Dusun 3 Sei Nipah. Pak Bobi misalnya.⁴⁴ Sebelum kembali menggunakan alat tangkap sederhana, Pak Bobi sempat melaut menggunakan *trawl*. Ia memperolehnya dari seorang *tokeh*⁴⁵ beretnis Tionghoa. Namun, pada akhirnya, Pak Bobi mendapat penentangan dari nelayan di dusunnya yang kemudian melaporkan perilakunya itu ke serikat nelayan, sehingga ia memutuskan untuk kembali menggunakan alat tangkap sederhana. Lebih lagi, ketika tiba di darat, hasil tangkapan yang melimpah itu harus

melewati sebuah sistem ‘permainan’ harga yang dimonopoli oleh para *tokeh*. Atau dengan kata lain, ditentukan secara sepihak.

Dampak dari perilaku nekat Pak Bobi menggunakan *trawl* ini tidak main-main. Hubungannya dengan beberapa nelayan setempat sempat mengalami ketegangan. Kasus Pak Bobi membuktikan bahwa hasrat personal manusia berpotensi melawan arus besar di sekelilingnya. Ia berani mengabaikan ketidaksukaan banyak nelayan tradisional terhadap *trawl* hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan yang lain. Dalam kasus ini, kalkulasi ekonomi jelas menjadi pertimbangan utama. Hanya saja, hasrat personalnya itu berbenturan dengan realitas bahwa menggunakan *trawl* tidak menjamin kesejahteraan nelayan. Beruntung, nelayan Dusun 3 Sei Nipah secara umum masih terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga gesekan yang muncul dapat diredam.

Perlawanan yang Enggan Terkalahkan

Scott merumuskan perlawanan sebagai tindakan dari kelas yang dikuasai (subordinat) dengan tujuan mengurangi atau menolak klaim yang kelas penguasa (superordinat) bebaskan kepada mereka; atau untuk mendorong klaim mereka sendiri ketika berhadapan langsung dengan kelas-kelas penguasa.⁴⁶ Definisi perlawanan Scott itu diletakkan dalam konteks dominasi yang dilakukan kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai.⁴⁷ Kelas-kelas penguasa yang

44. Wawancara dengan Pak Bobi, 11 Juli 2019.

45. Majikan atau tengkulak.

46. James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. (New Haven dan London: Yale University Press, 1985). 290.

47. Pengertian dominasi dan subordinasi itu diuraikan Scott sebagai berikut, “*These forms of domination are institutionalized means of extracting labor, goods, and services from a subject population. They embody formal assumption about superiority and inferiority, often in elaborate ideological form, and a fair degree of ritual and ‘etiquette’ regulates public conduct within them. In principle at least,*

dimaksud adalah para tuan tanah, para pemodal, dan negara. Berdasarkan rumusan pengertian itu, Scott membagi perlawanan ke dalam dua jenis, yakni perlawanan nyata dan perlawanan simbolik.⁴⁸

Ciri pokok dari perlawanan nyata adalah terorganisir, sistematis, dan bekerjasama; memegang teguh kaidah asas (prinsip) dan tanpa pamrih; memiliki tuntutan atau keharusan revolusioner; dan atau mengandung gagasan atau tujuan untuk meniadakan landas-pijakan penguasaan oleh kelas penguasa.⁴⁹ Sementara itu, perlawanan simbolik memiliki ciri pokok; tidak terorganisir, tidak sistematis, dan lebih personal; bersifat 'untung-untungan' (oportunistis) dan demi kepentingan diri sendiri; tidak memiliki tuntutan atau kemestian revolusioner; dan atau menyiratkan dalam gagasan atau pemaknaan mereka akan adanya niat untuk berdamai dengan sistem penguasa.⁵⁰ Ciri pokok yang disebutkan terakhir ini biasa disebut dengan 'perlawanan keseharian' (*everyday resistance*).⁵¹ Dalam konteks ini pula, Scott membedakan bentuk dan wilayah perlawanan itu ke dalam dua jenis, yang disebut sebagai 'ungkapan terbuka' (*public transcript*) dan 'ungkapan terselubung' (*hidden transcript*). *Public transcript* bercirikan adanya interaksi

(perlawanan) terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat.⁵² Berbeda dari *public transcript*, *hidden transcript* bersifat lebih tertutup, yakni interaksi (perlawanan) yang tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat.⁵³

Dalam konsepsi sejarah sebagai perjuangan kelas, kelas buruh atau proletar terlihat jelas bertentangan dengan kaum pemodal dan kaum tani berhadapan dengan tuan tanah dalam relasi produksi agrarian, maka perlawanan nelayan agaknya lebih susah dipetakan apabila dikaitkan dengan problem relasi produksi. Adanya konflik sebagai konsekuensi perebutan atas faktor produksi penting (ikan) dapat dianggap menjadi salah satu pemicu munculnya perlawanan nelayan.

Meskipun begitu, tetap ada relevansi yang dapat ditarik dari perlawanan kaum tani atau pun buruh untuk merefleksikan lebih lanjut mengenai perlawanan nelayan, yakni setiap sejarah perlawanan cukup intens menyoroiti peran negara (pemerintah) sebagai aktor yang sering diposisikan menjadi lawan, karena lebih banyak membela pihak yang dianggap sejalan. Namun, penyoroitan negara dalam konteks perlawanan nelayan tradisional terhadap *trawl* tidak

status in this system of domination is ascribed by birth, mobility is ritual nil, and subordinated groups are granted few if any political or civil right. Although they are highly institutionalized, these forms of domination typically contain a strong element of personal rule."

James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. (New Haven dan London: Yale University Press, 1990), 21

48. James C. Scott, *Weapons of the Weak*, 292.

49. James C. Scott, *Weapons of the Weak*, 292.

50. James C. Scott, *Weapons of the Weak*, 292.

51. Vinthagen dan Johanson mengatakan bahwa Scott secara bergantian menyebutkan perlawanan keseharian sebagai *infrapolitics*, yang merupakan suatu konsep teoretis untuk memabarkan jenis perlawanan yang berbeda; tampak tak dramatis seperti yang terlihat dalam pemberontakan, kerusuhan, demonstrasi, revolusi, perang saudara, atau bentuk-bentuk perlawanan lain yang terorganisir, bersifat kolektif, dan konfrontatif. Lihat Stellan Vinthagen dan Anna Johansson, "Everyday Resistance: Exploration a Concept and Its Theories" *Resistance Studies Magazine* 1 (2013).

52. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 4.

53. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 4.

menempatkan negara sebagai aktor yang secara langsung berkonfrontasi dengan nelayan. Tetapi lebih kepada peran negara lewat perangkat-perangkat kebijakan yang tidak adil atau kebijakan yang dirasa adil namun pada pelaksanaannya tidak konsekuen sehingga berakibat pada munculnya gerakan perlawanan.

Kesadaran tentang pentingnya gerakan nelayan di Sumatera Utara mulai berkembang sebelum reformasi 1998. “Waktu itu gerakan nelayan masih kalah populer dibanding gerakan petani dan buruh. Tapi ada beberapa di antara kita bersama aktivis LSM yang punya inisiatif untuk bikin kegiatan yang bisa mempertemukan nelayan, khususnya di Sumatera Utara,” cerita Pak Sutris.⁵⁴ Kegiatan seperti kontak antar nelayan hingga sarasehan nelayan Sumatera Utara pun mulai dilangsungkan, yang berujung pada timbulnya kesadaran akan pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan. Namun, represifitas Orde Baru waktu itu memberi dampak besar bagi perkembangan gerakan rakyat di Indonesia. Setiap gerakan rakyat yang muncul acap diidentikkan sebagai penentangan terhadap ideologi pembangunan Orde Baru (*developmentalism*). Hal ini sedikit banyak telah memengaruhi tumbuhnya gerakan nelayan, yang pada gilirannya membawa pengaruh positif dengan munculnya perlawanan secara terorganisir. Pada 1998, dengan proses yang sudah ada sebelumnya, ditambah atas dorongan kesadaran kuat dari para nelayan yang berasal dari tiga kabupaten di Sumatera Utara, yakni Langkat, Deli Serdang, dan Asahan, maka dibentuklah SNSU. Serikat ini berdiri pada tanggal 14 Juli 1998 dan mendeklarasikan dirinya

sebagai satu-satunya organisasi nelayan di luar bentukan negara. Deklarasi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa nelayan tidak berada di dalam satu wadah tunggal yang sudah ada sebelumnya, yakni HNSI.

Sebelum serikat nelayan terbentuk, nelayan tradisional hanya melakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan keseharian atau perlawanan simbolik. Kemudian, setelah serikat nelayan terbentuk pasca reformasi, perlawanan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah terhadap *trawl* adalah bentuk perlawanan nyata sebagaimana dikerangkakan oleh Scott. Kehadiran serikat mampu memantik kesadaran nelayan untuk melawan secara bersama-sama dan terorganisir. Tindakan main hakim sendiri sebagai manifestasi dari perlawanan simbolik—seperti yang diangkat di sini—mulai ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan konflik internal yang dapat melemahkan perlawanan.

Dengan melakukan perlawanan nyata ala Scott, nelayan tradisional semakin memiliki basis perjuangan yang kuat dan kian diperhitungkan. Kemudian, dengan berserikat, perlawanan nelayan tradisional dapat langsung menasar target utama—pemerintah atau aparat, misalnya, yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan—tanpa perlu bentrok langsung dengan oknum-oknum yang melanggar aturan (nelayan *trawl*). Serikat menjadi wadah efektif untuk mengaktifkan kesadaran nelayan tradisional dengan terus-menerus menggulirkan wacana untuk melawan *trawl* tanpa perlu main hakim sendiri. Serikat menjadi unsur penting untuk terlibat dalam

54. Wawancara dengan Pak Sutris, Ketua ANSU, 20 Juli 2019.

proses yurisdiksi atau legislasi guna menghasilkan konten kebijakan yang adil. Serikat dapat pula menyumbang pada proses politik dan birokrasi untuk menghasilkan tindakan pelaksanaan kebijakan yang konsekuen dengan cara melakukan pengawasan secara eksternal. Serikat juga potensial untuk menyebarkan wacana relevan guna membangun budaya hukum yang baik melalui mobilisasi massa nelayan yang dinaunginya.

Salah satu kasus dari mobilisasi massa nelayan terjadi pada Senin 27 Agustus 2018 silam. Hampir seribu massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)⁵⁵ menggeruduk Markas Polda (Mapolda) Sumut.⁵⁶ Mereka datang dari berbagai daerah. Mulai dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, hingga Tanjung Balai. Begitu tiba, seketika Lapangan Utama Mapolda Sumut penuh. Poster-poster tuntutan para nelayan pun langsung dibentangkan. Massa yang terdiri dari para nelayan tradisional ini melakukan protes terkait masih maraknya penggunaan *trawl* di laut.

Tentu ini bukanlah demonstrasi perdana yang dilakukan nelayan tradisional. "Sudah terlalu sering," kata Pak Irwan ketika saya bertanya mengenai berapa kali nelayan tradisional sudah melakukan protes. Katanya, hampir seluruh instansi sudah pernah disambangi nelayan tradisional, seperti kepolisian, kantor gubernur, kantor DPRD, aksi di laut, mendatangi kabupaten yang diduga menjadi markas

pemodal yang menyuplai *trawl*, hingga mendatangkan Menteri Susi Pudjiastuti. Karena itu, dari tradisi perlawanan yang sudah terbangun, dapat dipastikan eskalasi perlawanan nelayan tradisional akan terus meningkat apabila *trawl* masih terus beroperasi.

Berdasarkan jenis perlawanan yang dirumuskan Scott, perlawanan nelayan tradisional jelas mengalami transisi dari perlawanan simbolik menjadi perlawanan nyata. Kesadaran atas tidak efektifnya melakukan perlawanan secara sporadis dan parsial menjadi titik tolak nelayan tradisional untuk merumuskan bentuk perlawanan baru. Karena itu, pendapat Vinthagen dan Johansson agaknya lebih membantu dalam upaya memahami kenyataan ini, bahwa perlawanan bukan dibagi menjadi dua jenis secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai suatu kesinambungan antara pertentangan terbuka (konfrontasi publik) dan subversi tersembunyi.⁵⁷ Pembagian jenis perlawanan secara terpisah ini, mengikuti Williams, seharusnya dilihat lebih sebagai bentuk-bentuk dari keberlanjutan perlawanan.⁵⁸

Maka dari itu, saya kira perlawanan nelayan tradisional terhadap *trawl* saat ini bergerak sangat dinamis dan tak pernah berhenti. Transisi dari perlawanan simbolik menjadi perlawanan nyata adalah bukti bahwa bentuk dan cara perlawanan berlangsung silih berganti menyesuaikan dengan tingkat keberhasilan. Satu hal yang pasti, perlawanan nelayan tradisional akan terus bergulir selagi *trawl* masih tetap

55. Berdasarkan penuturan Pak Sutris, ANSU adalah organisasi gabungan nelayan yang terbentuk dari dorongan SNSU. Terbentuknya SNSU berhasil memantik banyak nelayan untuk membentuk bermacam organisasi sejenis. Saat ini, SNSU tergabung di dalam ANSU.

56. Lihat Rozie Winata dan Irvan Sugito, "Pukat Trawl Bebas Beroperasi di Sumut", Medanbisnisdaily.com, Last modified 2019, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/08/28/357820/pukat_trawl_bebas_beroperasi_di_sumut/.

57. Stellan Vinthagen dan Anna Johansson, "Everyday Resistance: Exploration a Concept and Its Theories."

58. J. Patrick Williams, "The Multidimensionality of Resistance in Youth-Subcultural Studies," *Resistance Studies Magazine* 2 (2009).

berkelieran di laut. Seperti apa yang sering dikatakan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah, “Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi?”

Epilog

“Sebenarnya sepele saja kalau mereka (*pemerintah*) mau menegakkannya. Nggak perlu mereka datang ke laut buat ngepung katrol-katrol itu. Cukup datang saja gudang pengusaha yang menyediakan katrol. Tahu kok mereka tempatnya. Kalau pengusaha-pengusaha katrol itu berontak, tinggal tunjukkan saja aturannya. Selesai. Jadi buat saya, langsung saja, aturan yang ada itu dibuat bukan untuk dijalankan, tapi memang untuk dilanggar. Faktanya dari aturan pertama kali keluar tahun 80 sampai sekarang, kenapa trawl itu tidak hilang-hilang? Begini, sabu-sabu yang diselundupkan di dalam badan saja sekarang bisa ketahuan. Kenapa katrol yang begitu besar tidak bisa?”⁵⁹

Ungkapan Pak Irwan di atas secara gamblang menunjukkan problem penyelesaian trawl hari-hari ini. Barangkali jawabannya klise, namun itulah fakta yang sampai detik ini berlangsung dan belum mampu terselesaikan: penegakan hukum. Nihilnya ketegasan pemerintah beserta aparatusnya yang tidak langsung menasar inti permasalahan membuat trawl masih tetap beroperasi sampai hari ini. Aturan yang telah dibuat pemerintah pusat tidak membuahkan hasil di lapangan. Kasus ini juga menyiratkan fakta pejal, bahwa sebuah peraturan baru akan ditegakkan apabila mendapatkan

desakan berupa aksi-aksi kolektif dari pihak yang dirugikan.

Kenyataan ini menunjukkan terdapat celah antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan implementasi riilnya di daerah. Ruang kosong ini sangat mungkin diisi oleh tindakan jahil yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang, bisa saja, adalah oknum-oknum yang menyelewengkan otoritasnya lalu kemudian bersembunyi di balik jubah lembaga formal dengan mendalihkan adanya keterbatasan wewenang atau sumberdaya yang dimiliki. Karena itu, nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah secara tegas mengatakan bahwa problem penegakan aturan pelarangan *trawl* macet di aras pemerintahan daerah. Problem penegakan aturan tersebut mendorong beberapa aktivis serikat nelayan merasa perlu melibatkan diri dalam proses yurisdiksi dan legislasi dengan berupaya menjadi anggota legislatif pada pemilihan umum akhir-akhir ini.⁶⁰ Selain itu, kelompok warga perempuan juga mulai membangun ekonomi alternatif dalam upaya mendukung keberlangsungan gerakan dengan menginisiasi koperasi dan ekowisata berbasis masyarakat.⁶¹

Aturan pelarangan *trawl* termutakhir yang dicetuskan Susi Pudjiastuti memang belum mampu membersihkan operasi *trawl*, apalagi di perairan Sumatera Utara. Namun, aturan ini pulalah yang membuat girah perlawanan nelayan tradisional terhadap *trawl* tetap terjaga. Sebab, aturan ini

59. Wawancara dengan Pak Irwan, 21 Juli 2019.

60. Lihat Iqra Anugrah, “Fishing for Votes in Indonesia - New Mandala”, New Mandala, Last modified 2019, <https://www.newmandala.org/fishing-for-votes-in-indonesia/>.

61. Lihat Iqra Anugrah, “Women Among the Fishers”, Indonesia At Melbourne, Last modified 2019, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/women-among-the-fishers/>.

mencerminkan bahwa pemerintah telah menyadari kehadiran *trawl* bukan hanya menyebabkan terusiknya norma-norma keadilan di kalangan nelayan tradisional, tetapi lebih kepada bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelestarian ekosistem laut. Artinya, aturan pelarangan *trawl* dapat menjaga semangat perlawanan nelayan, namun di sisi lain menunjukkan lemahnya pemerintah dalam menegakkan aturan.

Macetnya penegakan aturan pelarangan *trawl* menunjukkan bahwa perubahan tekstual kebijakan saja tidak menjamin adanya perubahan kontekstual yang jauh lebih penting dan mendasar di tengah masyarakat. Idealnya, mengikuti Topatimasang, justru perubahan kontekstual terjadi lebih dahulu sebagai prasyarat mendesak terjadinya perubahan tekstual.⁶² Bukan sebaliknya, perubahan tekstual yang memaksakan perubahan kontekstual di tengah masyarakat.⁶³ Dengan kata lain, aturan pelarangan *trawl* hanya menyentuh perubahan tekstual (isi) kebijakan dan belum mampu tiba pada perubahan kontekstual pada aras struktur (pelaksanaan dan pelaksana) serta budaya (perilaku dan penerimaan masyarakat) atas kebijakan atau aturan itu.

Dalam pandangan nelayan tradisional Dusun 3 Sei Nipah, problem *trawl* sejatinya bukanlah persoalan kecemburuan sosial karena nelayan tradisional dianggap tidak mampu membeli alat tangkap itu. Persoalan sebenarnya terletak pada dampak dari penggunaan *trawl* itu sendiri, yakni rusaknya ekosistem laut yang kemudian

mengakibatkan dampak-dampak lain, termasuk terganggunya kehidupan nelayan tradisional. Secara ekonomi, hasil tangkap nelayan tradisional berkurang dan alat tangkap mereka mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat nelayan harus mengeluarkan modal lebih agar dapat melaut kembali. Ditambah lagi, kondisi laut yang serba tak pasti membuat nelayan tradisional kian terpuruk. Secara sosial, *trawl* tak hanya menimbulkan konflik langsung antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl*, tetapi juga berpotensi menyulut konflik di kalangan internal nelayan tradisional.

Dusun 3 Sei Nipah adalah desa nelayan yang selalu merasa terancam atas hadirnya *trawl* dalam kehidupan mereka. Ancaman-ancaman itu pula yang pada gilirannya direspons oleh nelayan tradisional dengan menggulirkan perlawanan. Aksi bakar-membakar hingga berunjuk rasa di depan kantor dewan terhormat sudah pernah mereka lakukan. Perlawanan nelayan tradisional mengalami transisi dari yang semula berupa perlawanan simbolik hanya karena sudah terlewat geram, menjadi perlawanan nyata yang bersifat kolektif dan berlandaskan pada kesadaran untuk terus merawat ekosistem laut sebagai tempat menyambung hidup. Dalam konteks perlawanan yang dinamis itu, serikat nelayan memiliki andil besar, khususnya dalam meningkatkan kesadaran nelayan tradisional untuk terus menolak kehadiran *trawl*. Serikat menjadi wadah bagi nelayan tradisional untuk memperkuat basis perlawanan.

62. Roem Topatimasang, "Mencabar Sang Dajjal," dalam *Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Roem Topatimasang (ed.). (Yogyakarta dan Banda Aceh: INSIST Press dan PRODEELAT, 2015), xxiv.

63. Roem Topatimasang, "Mencabar Sang Dajjal.", xxiv.

Problem *trawl* dan penentangan oleh nelayan tradisional jelas bukan sesuatu yang baru. Bahkan sudah menjadi cerita usang tatkala persoalannya tak kunjung selesai dan *trawl* masih tetap bergentayangan di laut hari-hari ini. Adagium “mati satu tumbuh seribu” masih hangat di kalangan nelayan tradisional dalam menyikapi fenomena *trawl* saat ini: semakin sering *trawl* ditertibkan, semakin liar pula operasinya. Penggunaan alat-alat tangkap yang rakus semacam *trawl* tentu tidak lepas dari masuknya pemodal besar ke dalam sektor penangkapan ikan. Sial bagi para nelayan tradisional, pemodal besar acapkali bersekongkol dengan oknum penguasa agar bisa meraup hasil laut sebanyak-banyaknya tanpa menyisakan apapun bagi mereka.

Daftar Pustaka

- Acheson, James M. "Anthropology of Fishing". *Annual Review of Anthropology* 10, 1 (1981): 275–316. doi:10.1146/annurev.an.10.100181.001423.
- Anugrah, Iqra. "Fishing for Votes in Indonesia". *New Mandala* (diakses 9 Juli 2019).
- Anugrah, Iqra. "Women Among the Fishers". *Indonesia at Melbourne* (diakses 29 Oktober 2019).
- Bailey, Conner. "Conflict in the Commons: The Case of Indonesian Fisheries". *Annual meeting of Association of Asian Studies, Chicago* (Maret 1986).
- Bailey, Conner. "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia". *Indonesia* 46 (1988): 25. doi:10.2307/3351043.
- Eayrs, Steve. *A Guide to Bycatch Reduction in Tropical Shrimp-Trawl Fisheries*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007.
- Eka Syaputri, Novita. "Pukat Dapat Merusak Ekosistem dan Sebabkan Degradasi Sumber Daya Perikanan". *Wwf.or.id* (diakses 29 Oktober 2019).
- Emmerson, Donald K. "Orders of Meaning: Understanding Political Change in A Fishing Community in Indonesia" dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin (ed.), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1982.
- Kurniawan, Frendy. "Polemik Cantrang dan Angka Perikanan Tangkap Indonesia". *Tirto.id* (diakses 22 Juli 2019).
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, 2001.
- Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Scott, James C. *Weapons of The Weak*. New Haven dan London: Yale University Press, 1985.
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. New Haven dan London: Yale University Press, 1990.
- Topatimasang, Roem. "Mencabar Sang Dajjal" dalam Roem Topatimasang (ed.), *Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, xv–xxviii. Yogyakarta dan Banda Aceh: INSISTPress dan PRODEELAT, 2015.

- Vinthagen, Stella, dan Anna Johansson. "Everyday Resistance: Exploration A Concept and its Theories". *Resistance Studies Magazine* 1, 2013.
- Williams, Patrick J. "The Multidimensionality of Resistance in Youth-Subcultural Studies". *Resistance Studies Magazine* 2, 2009.
- Yuwono, Pujo Semedi Hargo. "Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan". *Populasi* 13, no. 1 (2002). doi:10.22146/jp.11831.
- Yuwono, Pujo Semedi Hargo. *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*. Jakarta: KONPHALINDO, 1998.
- Yuwono, Pujo Semedi Hargo. *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s*. Yogyakarta: Benang Merah, 2003.
- Winata, Rozie, dan Irvan Sugito. "Pukat Trawl Bebas Beroperasi di Sumut". *Medanbisnisdaily.com* (diakses 3 November 2019).
- Wood, Ellen Meiksins. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. London: Verso, 2002.